



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 93 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENJUALAN/PELELANGAN SERTA PELEPASAN HAK
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 26 Tahun 2014 dan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Padang serta Keputusan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang, dilakukan penjualan/pelelangan terbatas kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- b. bahwa kendaraan dinas operasional yang sudah dibeli dan dilunasi sesuai dengan harga yang telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara Panitia Penjualan/Pelelangan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Nomor 03-20/BAP/IV-2014, tanggal 10 April 2014, tentang Penjualan/Pelelangan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Padang, dapat dilakukan pelepasan hak milik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penjualan/Pelelangan serta Pelepasan Hak Kendaraan Dinas Operasional Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 225/MK/V/1971 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Penghapusan dan Pelelangan/Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4);
16. Keputusan Walikota Padang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Panitia Penjualan/Pelelangan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Menjual/melelang dan melepaskan hak terhadap kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kota Padang kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diperkenankan untuk balik nama kendaraan atas nama sendiri.
- KETIGA : Biaya balik nama kendaraan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dibebankan kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil selaku pembeli kendaraan/pemenang lelang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 April 2014

Pj. WALIKOTA PADANG


ERIZAL

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Inspektur Kota Padang
3. Sdr. Kepala SKPD terkait
4. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 93 TAHUN 2014
 TENTANG PENJUALAN/PELELANGAN SERTA PELEPASAN HAK
 KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA PADANG

PENJUALAN/PELELANGAN SERTA PELEPASAN HAK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

No	Unit Kerja	Identitas Kendaraan		Tahun Perolehan	Nomor			Nomor Polisi		Harga Pasar (Banset) Rp	Cek Fisik (Dishub) %	Harga Pasar x Hasil Cek Fisik	Biaya Perbaikan (Rp)	Harga Limit (Rp)	Harga Jual (Rp)	Pemenang
		Nama / Jenis	Mark / Type		Rangka	Mesin	BPKB	Lama	Baru							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	DPKA	Kendaraan Roda Empat	Mitsubishi/Minibus	2000	VA1WHR-000591	4G18-034941	8788359 C	BA 2713 T	BA 1261 AV	85,000,000	15.68%	13,328,000	0	14,000,000	16,400,000	Fitrah Moeledy, SH
2	DPRD	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	2005	MHF3W430254015911	1TR-6076742	6546071 C	BA 2 A	BA 2777 T	145,000,000	20.15%	29,217,500	0	30,000,000	32,100,000	Yusnimar, SPd
3	DPRD	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	2005	MHF3W430154019190	1TR-50106689	6546070 C	BA 7 A	BA 2798 JP	145,000,000	20.22%	29,319,000	0	30,000,000	32,100,000	Yeni Roza, SH
4	DPRD	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	2005	MHF3W430254018825	1TR-6102860	6546072 C	BA 8 A	BA 2799 JP	145,000,000	20.12%	29,174,000	0	30,000,000	32,100,000	Rosdahli R.
5	Dishub Kominfo	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	1993	MHF21KF40-01145306	5K-9188542	1197267 C	BA 2795 JI	BA 1186 AM	39,000,000	15.30%	5,967,000	0	6,500,000	9,000,000	Chairwati
6	Bagian Umum	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Sedan	2003	MHF33BK30-34001286	2AZ-3057879	5214755 C	BA 1719 J	BA 1700 JA	203,000,000	16.63%	33,758,900	0	34,500,000	37,000,000	Suprianto
7	Bagian Umum	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	2001	MHF11KF60-10065286	7K-0413444	0525591 C	BA 22 A	BA 1972 AA	70,000,000	13.83%	9,681,000	0	10,500,000	12,900,000	Mawardas
8	Bagian Umum	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	2003	MHF11UF81-30032887	1RZ-7032907	5214769 C	BA 2792 JB	BA 1841 AT	123,000,000	16.80%	20,664,000	0	21,500,000	23,600,000	Ir. Asnel, Mei
9	BMPPT	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	2002	MHF11KF80-20070671	7K-0485495	2634553 C	BA 2725 T	BA 1619 BQ	72,000,000	15.93%	11,469,600	0	12,000,000	14,400,000	Muji Susilawati, SH, MM
10	BKD	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	1995	MHF21KF40-00192310	5K-9281362	2831573 C	BA 2760 JC	BA 1733 AR	40,000,000	18.85%	7,540,000	0	8,000,000	10,500,000	Rafyon
11	BAPPEDA	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	1993	MHF21KF40-01147001	5K-9191557	1197281 C	BA 2795 JH	BA 1130 AT	37,000,000	13.03%	4,821,100	0	5,500,000	8,000,000	Bash, SE, MM
12	Kantor Ketahanan Pangan	Kendaraan Roda Empat	Mitsubishi/Minibus	2003	MHMVA1WHR3K002188	4G18-2X4549	4492160 C	BA 2767 JB	BA 57 A	88,000,000	17.60%	15,488,000	0	16,000,000	18,400,000	Drs. Darwis Chandra, MM
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	1993	MHF21KF40-01147818	5K-9193853	1197249 C	BA 2701 JO	BA 1684 AV	39,000,000	16.45%	6,415,500	0	7,000,000	9,500,000	Faisal Fuad
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	1991	KF40-092687	5K-9075930	9482646 C	BA 2702 T	BA 1075 AF	33,000,000	15.42%	5,088,600	0	6,000,000	8,500,000	Riswardi A. Amd
15	DIRTBP	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	2003	MHF11UF81-30034818	1RZ-7034969	4733893 C	BA 34 A	BA 34 A	123,000,000	20.67%	25,424,100	0	25,000,000	28,100,000	Ir. Dian Fakri, MTP
16	DIRTBP	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Pick-Up	1996	MHF31KF52-00026834	7K-0057994	4094635 C	BA 9612 JA	BA 8701 J	33,000,000	15.52%	5,121,600	0	6,000,000	8,500,000	Syafruddin, S.Sos
17	Bagian Humas dan Protokol	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	1997	MHF11KF80-00005331	7K-0123268	5721515 C	BA 2794 JC	BA 1293 AR	51,000,000	14.70%	7,497,000	0	8,000,000	10,500,000	Suardi, SH, MH
18	Dishub Kominfo	Kendaraan Roda Empat	Isuzu/Minibus	1997	MHCTBR54BVC027918	E-027918	6130979 C	BA 2725 JM	BA 1105 AJ	45,000,000	15.07%	6,781,500	0	7,500,000	10,000,000	Dwi Subriati
										1,516,000,000		266,756,400	0	279,000,000	321,600,000	

PJ. WALIKOTA PADANG


 ERIZAL